Copyright © The Author(s) 2026
Journal Social Society Vol 6 No 2, April - June 2026

Pengaruh Jumlah Kantor Bank, Peran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Non Performing Loan terhadap Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dengan Produk Domestik Regional Bruto sebagai Variabel Moderasi

Anisha Rosevita Dewi [1]*, Ivan Yudianto [2]

[1, 2,] Universitas Padjadjaran, Indonesia

* anisha22003@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peran perbankan, kebijakan pemerintah daerah, serta kondisi ekonomi regional. Penyaluran KUR merupakan pilar penting dalam pemberdayaan ekonomi daerah, khususnya bagi sektor UMKM di Jawa Barat. Namun, efektivitas penyaluran ini seringkali dipengaruhi oleh aksesibilitas perbankan, kebijakan pemerintah, dan profil risiko kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kantor bank, peran pemerintah daerah, dan tingkat *non-performing loan* (NPL) terhadap penyaluran KUR baik secara langsung maupun dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel moderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dengan teknik pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan ketersediaan data sehingga diperoleh 27 wilayah (18 kabupaten dan 9 kota) selama periode 2021–2024, instrumen penelitian berupa dokumentasi data sekunder dari instansi resmi, serta teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan dan publikasi statistik terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dan *moderated regression analysis* (MRA) menggunakan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kantor bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran KUR, sedangkan peran pemerintah daerah berpengaruh signifikan namun negatif. Variabel NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran KUR. Selain itu, PDRB mampu memperkuat pengaruh jumlah kantor bank terhadap penyaluran KUR, tetapi tidak memoderasi pengaruh pemerintah daerah dan NPL. Penelitian ini menegaskan bahwa aksesibilitas perbankan menjadi faktor utama dalam penyaluran KUR sehingga diperlukan optimalisasi kebijakan daerah dan peningkatan literasi keuangan pelaku usaha.

Kata Kerja: *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jumlah Kantor Bank, Peran Pemerintah Daerah, Non-performing Loan (NPL), PDRB.*

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara, baik pada maju maupun berkembang, menurut fenomena global. Laporan OECD tahun 2024 UMKM rata-rata menyumbang 50% hingga 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap 60% hingga 70% tenaga kerja di negara-negara berkembang, dan berkontribusi hingga 40% dari PDB di negara-negara berpenghasilan tinggi. Hal ini semakin penting setelah pandemi COVID-19, dikarenakan UMKM telah terbukti dalam

https://doi.org/10.30605/jss.6.2.2026.1284

membantu ekonomi ketika perusahaan besar mengalami kontraksi yang cukup signifikan (OECD, 2024).

UMKM menjadi inti perekonomian, dengan kontribusi PDB antara 45% hingga 55% dan menyerap lebih dari 70% angkatan kerja formal maupun informal (World Bank, 2023). Selain itu, UMKM juga menyumbang lebih dari separuh lapangan kerja di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara serta menjadi sumber utama pengentasan kemiskinan, meskipun akses mereka terhadap pembiayaan formal masih sangat terbatas (World Bank, 2023). Pergeseran ke konteks dalam negeri yaitu Indonesia, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian negara dengan menyumbang lebih dari 60% dari PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, menjadikannya sebagai pilar utama ketahanan ekonomi di tengah guncangan ekonomi global.

Kementerian Koperasi dan UKM (2024) menyatakan bahwa UMKM, dengan 66 juta perusahaan, mendominasi struktur bisnis dan berkontribusi besar terhadap ekspor dan inovasi lokal. Namun, kendala akses pasar dan pembiayaan terus menghalangi kemajuan mereka. Sebagaimana ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, UMKM memainkan peran penting dalam pemulihan setelah pandemi, dengan daya serap tenaga kerja mencapai 119 juta orang pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan ketergantungan perekonomian Indonesia pada sektor ini untuk mencapai target pertumbuhan 5% - 6% per tahun (Kementerian Koperasi & UKM, 2024). Berikut merupakan tabel data kontribusi UMKM secara nasional pada tahun 2020 - 2024.

***Tabel 1**. Kontribusi UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

Tahun	Kontribusi Terhadap PDB (%)	Kontribusi PDB (Rp Triliun)	Penyerapan Tenaga Kerja (%)
2020	60.51 %	8.500 dari PDB Rp14.057 T	96.92 %
2021	60.41 %	8.573,89 dari PDB Rp15.692 T	97.00 %
2022	61.00 %	9.580 dari PDB Rp15.692 T	97.00 %
2023	61.07 %	9.580,8 dari PDB Rp15.692 T	97.00 %
2024	61.97 %	10.500 dari PDB Rp16.950 T	97.00 %

Pemberdayaan terhadap UMKM terbukti mampu mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara tegas menempatkan pemberdayaan sektor ini sebagai prioritas nasional. Pada 5 November 2007, melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 program Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat. Program KUR adalah program yang dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Pembiayaan ini disalurkan melalui lembaga keuangan dengan menggunakan sistem penjaminan. Tujuannya adalah untuk memperkuat modal usaha guna mendukung kebijakan percepatan pertumbuhan sektor riil serta pemberdayaan UMKM. Dana KUR bersumber dari perbankan, dialokasikan untuk keperluan modal kerja dan investasi, serta diberikan kepada individu atau kelompok UMKM yang menjalankan usaha potensial namun belum layak secara kredit dari sisi perbankan (Solekah & Nuvriasarai, 2025).

Program KUR mengalami perubahan skema pemberian subsidi. Pada periode pertama penyaluran KUR, yaitu tahun 2007 sampai dengan 2014, subsidi KUR diberikan melalui mekanisme Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Kemudian pada tahun 2015, Komite Pelaksanaan Pembiayaan Bagi UMKM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KUR dan menyimpulkan bahwa skema saat itu tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, mulai Agustus 2015, KUR ditetapkan dengan skema subsidi bunga/marjin. Subsidi in membuat suku bunga KUR jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga kredit komersial perbankan. Tingkat suku bunga terus menurun sejak tahun 2008 sebesar 20% hingga tahun 2020 mencapai level 6%. Dalam

praktiknya realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) cukup fluktuatif (Somangunsong & Nurhadi, 2023).

Target dan realisasi program kredit usaha rakyat yang bersumber dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, menunjukkan peningkatan yang sangat jelas baik dalam target maupun pencapaiannya (Bosawer et al., 2024). Di tahun 2015, target penyaluran KUR hanya sekitar Rp30 triliun, dengan realisasi yang mencapai Rp22,75 triliun. Angka ini terus menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya, menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas fasilitas pembiayaan yang produktif untuk pelaku UMKM (Pramudyawardani & Hakim, 2024). Hingga memasuki tahun 2020 - 2024, dapat terlihat peningkatan yang cukup signifikan, misalnya di tahun 2020, target penyaluran KUR mencapai Rp198,63 triliun dan di tahun-tahun selanjutnya terus meningkat. Kenaikan ini sangat terkait dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi COVID-19, dimana pemerintah menjadikan KUR sebagai alat strategis untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan memastikan keberlangsungan UMKM.

Tren empiris terkait pelaksanaan Program KUR di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun program ini menawarkan subsidi bunga rendah dan jaminan kredit parsial hingga 70%, penyaluran kredit seringkali terhambat karena akses yang tidak merata. UMKM di wilayah pedesaan cenderung mendapatkan proporsi pembiayaan yang lebih kecil dibandingkan UMKM di area perkotaan, karena keterbatasan infrastruktur keuangan dan koordinasi antar lembaga. Hal ini menyoroti fenomena baru, dimana pemerintah menetapkan target penyaluran sebesar Rp295 triliun atau disesuaikan dengan ketersediaan anggaran untuk KUR pada tahun 2026 guna memenuhi kebutuhan bisnis produktif yang terus meningkat.

Relaksasi kebijakan saat ini pun sedang disempurnakan secara khusus untuk penerima KUR dengan kriteria tertentu, termasuk: (i) menetapkan suku bunga/margin KUR tetap sebesar 6% per tahun dan (ii) menghapus batasan frekuensi akses KUR. Kebijakan ini direncanakan untuk memperluas cakupan implementasinya, yang sebelumnya hanya berlaku terhadap sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (4P), untuk mencakup industri pengolahan, konstruksi, manufaktur, serta semua sektor ekonomi lainnya yang terkait dengan produksi (Siaran Pers, Kemenko Bidang Perekonomian, 2025). Bersumber dari IDX Channel (2025), juga menyoroti mengenai tantangan besar yang dihadapi program KUR, yaitu terkait penyaluran dana yang tidak merata dan tepat sasaran. KUR cenderung diberikan kepada UMKM yang sudah bankable, bukan menarik UMKM *unbankable* menjadi *bankable*. Beralih menuju tingkat regional, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi UMKM terbesar di Indonesia (melebihi 13 juta unit pada tahun 2024), yang didukung oleh program KUR sebagai peran vital dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi regional, khususnya setelah Pandemi COVID-19.

Bersumber dari Kinerja Penyaluran KUR Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) pada tahun 2024, Provinsi Jawa Barat sebagai pusat dari UMKM terbesar di Indonesia dengan 12,5 juta unit UMKM yang berkontribusi 61% terhadap PDB provinsi pada tahun 2023. Hingga Oktober 2024, realisasi KUR di Jawa Barat mencapai Rp24 triliun dengan dukungan dari 4,27 juta debitur, mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 23,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih berada di bawah target provinsi sebesar Rp30 triliun. Penyaluran terbesar berasal dari sektor perdagangan besar dan ritel (56 persen), diikuti oleh sektor pertanian dan industri pengolahan, dengan KUR mikro yang mendominasi (64 persen atau Rp6,96 triliun untuk 162.942 debitur).

Volume penyaluran KUR di Jawa Barat terus tumbuh, terdapat variasi yang signifikan antar kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dalam hal ini, jaringan kantor bank memainkan peran penting dalam menentukan seberapa besar kemampuan pemerintah dalam memberikan KUR karena berfungsi sebagai titik pertama yang diakses oleh UMKM untuk mendapatkan informasi, konsultasi, mengajukan, dan memverifikasi kredit bersubsidi. Selain itu, jumlah jaringan kantor bank juga sangat membantu dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui program KUR yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah dan jaminan yang tidak terlalu tinggi, sehingga membantu para pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan produksi, memperluas pasar, dan memodernisasi usaha mereka (Arnola et al., 2025).

Distribusi jaringan kantor bank berpotensi memengaruhi pemerataan penyaluran KUR. Secara teori intermediasi keuangan, keberadaan jaringan kantor yang luas meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan perbankan. Semakin banyak kantor cabang yang tersebar di suatu wilayah, semakin besar peluang masyarakat untuk mengakses informasi dan fasilitas kredit serta semakin baik kondisi jaringan kantor bank di suatu wilayah, semakin besar kemampuan lembaga keuangan untuk mengumpulkan dana dan menyalurkannya ke sektor yang produktif, seperti UMKM, melalui program KUR. Dalam penelitian ini, jumlah kantor bank menunjukkan kemampuan sistem keuangan daerah dalam menjalankan fungsi intermediasi (Sari & utami, 2022).

Faktor krusial lainnya dalam mempercepat penyaluran KUR adalah pengoptimalan peran pemerintah daerah. Sebagai fondasi pengembangan UMKM, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangatlah esensial, khususnya untuk mendukung berbagai program nasional yang telah dirancang pemerintah pusat (Aristanto, 2019; Asmarani & Solehudin, 2024). Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 581/6871/SJ mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2015 yang ditujukan kepada seluruh gubernur serta bupati/walikota di Indonesia. Melalui Surat Edaran tersebut, tugas pemerintah daerah salah satunya yaitu mendata UMKM potensial di daerahnya untuk didanai oleh program KUR dan mengunggah data debitur potensial tersebut ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Hingga Mei 2024, baru tercatat 674 data calon debitur yang datanya diunggah oleh Pemda di Jawa Barat, padahal jumlah UMKM provinsi ini termasuk yang terbesar di Indonesia. Partisipasi tersebut masih rendah di sebagian besar kabupaten dan kota, dengan hanya sekitar 6 dari 27 Pemda yang aktif melakukan pengunggahan pada periode terkait. Kondisi ini menyebabkan penyaluran KUR kurang tepat sasaran dan gagal menjangkau UMKM non-bankable di daerah terpencil. Padahal, keterlibatan aktif pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas data calon debitur sehingga risiko kredit bermasalah dapat ditekan. Sinergi ini merupakan bentuk implementasi desentralisasi fiskal dan ekonomi dalam mendukung UMKM daerah (Prasetyo & Wibowo, 2021; Saputra & Dewi, 2023).

Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendata UMKM potensial di daerahnya yang kemudian mengunggah datanya ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan manifestasi langsung dari proses implementasi kebijakan Program KUR di tingkat daerah, Keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh enam variabel utama yang saling terkait: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi, (5) disposisi atau sikap pelaksana, serta (6) kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks KUR, variabel karakteristik agen pelaksana dan komunikasi antar organisasi menjadi sangat relevan karena Pemda bertindak sebagai agen pelaksana utama yang diamanatkan oleh Permenko Perekonomian dan Surat Edaran Kemendagri untuk

mendata UMKM potensial di daerahnya dan mengunggah data calon debitur potensial tersebut ke SIKP, sehingga data tersebut dapat langsung ditindaklanjuti oleh bank penyalur (Kurniawan & Sari, 2023).

Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) KUR juga menjadi faktor yang memengaruhi keberanian bank penyalur untuk meningkatkan penyaluran (Hidayat & Lestari, 2021). NPL merupakan indikator kualitas aset kredit yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara prudensial, rasio NPL yang tinggi mencerminkan meningkatnya risiko gagal bayar dalam portofolio kredit bank (Ramadan, 2023; Faiza & Dewi, 2025). Di Jawa Barat, NPL perbankan secara umum berada di level 3 persen, yang dapat menekan appetite bank jika tidak dikelola dengan baik. Tingginya NPL berpotensi mengurangi penyaluran kredit baru, terutama di kabupaten/kota dengan daya beli rendah dan sektor perdagangan yang mendominasi. Manajemen risiko yang buruk ini juga dipengaruhi oleh literasi keuangan UMKM yang masih rendah (Nugroho & Santosos, 2022).

Perspektif teori *credit rationing* mengemukakan bahwa peningkatan risiko kredit akan mendorong bank untuk membatasi jumlah kredit yang disalurkan, bukan semata-mata menaikkan suku bunga (Putri & Rahman, 2021). Teori ini menjelaskan bahwa dalam pasar kredit yang tidak sempurna dan penuh asimetri informasi, kenaikan suku bunga justru dapat memperburuk kualitas debitur akibat *adverse selection*. Debitur berisiko rendah cenderung keluar dari pasar ketika bunga meningkat, sementara debitur berisiko tinggi tetap bertahan (Susanti et al., 2024). Akibatnya, risiko rata-rata portofolio meningkat dan *expected return* bank menurun. Dalam situasi tersebut, pembatasan kuantitas kredit menjadi strategi optimal bagi bank (Yolanda & Tampubolon, 2021; Wulandari & Sari, 2022)

PDRB memainkan peran penting sebagai variabel yang memengaruhi hubungan antara jumlah jaringan kantor bank, peran pemerintah daerah dan tingkat NPL dengan keberhasilan penyaluran KUR, karena mencerminkan kondisi ekonomi makro suatu daerah yang menentukan kemampuan perekonomian dan potensi usaha UMKM (Firmansyah & Pratiwi, 2023). Wilayah dengan PDRB yang lebih tinggi biasanya memiliki aktivitas ekonomi, kapasitas produksi, dan permintaan pasar yang lebih baik, sehingga penyaluran kredit produktif seperti KUR bisa digunakan dengan lebih efektif, dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki PDRB rendah, di mana keterbatasan kemampuan ekonomi dapat mengurangi efek dukungan dari jumlah jaringan kantor bank, peran pemerintah daerah dan tingkat NPL terhadap penyaluran KUR.

Hal tersebut searah dengan teori pertumbuhan endogen yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan timbal balik dengan perkembangan sektor keuangan dan kelembagaan daerah. Sistem keuangan yang berkembang memainkan peran penting dalam mendorong pengumpulan modal dan inovasi, sementara kelembagaan yang efektif menciptakan insentif dan stabilitas yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi (Widiyaningrum & Nuvriasari, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi untuk mengkaji secara empiris pengaruh jumlah jaringan kantor bank, peran pemerintah daerah, dan tingkat NPL terhadap penyaluran KUR dengan PDRB sebagai variabel moderasi. Analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur intermediasi keuangan dan kebijakan pembiayaan UMKM. Selain itu, analisis ini juga diharapkan memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah, perbankan, dan pembuat kebijakan nasional.

Evaluasi empiris terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas program KUR. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademik, kebijakan, dan praktis dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis UMKM. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris pengaruh jumlah jaringan kantor bank, peran pemerintah daerah, dan tingkat non-performing loan, dengan PDRB sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen berupa realisasi KUR.

Kebaruan *(novelty)* penelitian ini terletak pada integrasi variabel perbankan dan faktor makroekonomi dalam satu model analisis yang komprehensif, khususnya dengan memasukkan PDRB sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara jumlah kantor bank, peran pemerintah daerah, dan tingkat NPL terhadap realisasi penyaluran KUR. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menguji pengaruh langsung variabel-variabel tersebut, studi ini menyoroti bagaimana kondisi ekonomi daerah mampu memperkuat atau memperlemah efektivitas penyaluran KUR. Selain itu, penggunaan data panel lintas kabupaten/kota memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan dinamis, sehingga menghasilkan kontribusi empiris yang lebih mendalam dalam memahami determinan penyaluran KUR di tingkat regional.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori yang bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data numerik serta analisis statistik untuk menjelaskan hubungan antarvariabel secara objektif dan terukur. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pengaruh jumlah kantor perbankan, peran pemerintah daerah, dan tingkat NPL terhadap realisasi penyaluran KUR, serta menguji peran variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Lokasi penelitian mencakup wilayah Provinsi Jawa Barat dengan unit analisis berupa 18 kabupaten dan 9 kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat, serta Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Periode penelitian meliputi tahun 2021 hingga 2024, sehingga diperoleh data panel dengan total 108 observasi (27 wilayah dikalikan 4 tahun). Pemilihan wilayah dan periode ini didasarkan pada ketersediaan data yang relevan serta representatif dalam menggambarkan kondisi penyaluran KUR di Jawa Barat.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini berupa dokumentasi data sekunder yang telah dipublikasikan oleh instansi terkait. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kantor perbankan, indikator peran pemerintah daerah (yang dapat berupa kebijakan atau dukungan terhadap UMKM dan KUR), tingkat NPL, serta realisasi penyaluran KUR di masing-masing kabupaten/kota. Variabel-variabel tersebut diukur dalam bentuk data kuantitatif sehingga dapat dianalisis menggunakan metode statistik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengakses laporan resmi, publikasi statistik, serta *database* yang tersedia dari masing-masing instansi terkait. Data dikumpulkan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan variabel penelitian, kemudian diseleksi dan diverifikasi untuk memastikan konsistensi dan kelengkapannya. Proses ini penting untuk menjaga validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam analisis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Tahap selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, guna memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi dasar dalam analisis ekonometrika.

Analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi panel dipilih karena mampu mengakomodasi data yang memiliki dimensi waktu (time series) dan individu *(cross section)* secara simultan, sehingga memberikan hasil estimasi yang lebih akurat. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier.

Analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis* / MRA) untuk menguji apakah variabel moderasi mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Tahap akhir adalah pengujian hipotesis menggunakan uji statistik, seperti uji t (parsial) dan uji F (simultan), serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak EViews 12, yang digunakan untuk memastikan keakuratan perhitungan serta efisiensi dalam pengolahan data panel dan analisis ekonometrika.

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. *Analisis Statistik Deskriptif*

Statistik	X1	X2	DX3	Z	Y
Mean	4.651537	6.091283	0.023143	10.19542	27.57411
Median	4.700480	5.755737	0.311752	10.05489	27.79392
Maximum	6.308098	11.09466	4.998912	11.43153	28.71790
Minimum	2.079442	1.791759	-6.467698	9.484633	25.24307
Std. Dev.	0.744614	2.217090	1.864646	0.531880	0.790961
Skewness	-0.900151	0.236997	-0.720863	0.882465	-1.141038
Kurtosis	4.944848	2.465465	4.945999	2.756027	3.577611
Jarque-Bera	31.60584	2.296794	26.39468	14.28524	24.93677
Probability	0.000000	0.317145	0.000002	0.000791	0.000004
Sum	502.3660	657.8586	2.499449	1101.106	2978.004
Sum Sq. Dev.	59.32618	525.9572	372.0287	30.26993	66.94133
Observations	108	108	108	108	108

Tabel 2 memberikan penjelasan rinci tentang masing-masing variabel penelitian, yaitu: 10. Variabel X1: Memiliki nilai rata-rata *(mean)* sebesar 4,651537 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,744614. Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebaran data variabel X1 cenderung stabil dan tidak memiliki fluktuasi yang ekstrem. Nilai data bergerak dari rentang minimum 2,079442 hingga maksimum 6,308098; 2). Variabel X2: Memiliki nilai rata-rata sebesar 6,091283 dan standar deviasi sebesar 2,217090. Hal ini menunjukkan variasi data yang cukup beragam pada variabel ini, dengan rentang nilai antara 1,791759 hingga 11,09466; 3). Variabel DX3: Menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,023143.

Variabel ini memiliki rentang yang cukup lebar dengan nilai minimum -6,467698 dan maksimum 4,998912, serta standar deviasi sebesar 1,864646; 4). Variabel Moderasi (Z): Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 10,19542 dengan tingkat variasi yang sangat

rendah, terlihat dari standar deviasi yang kecil yaitu 0,531880. Hal ini mengindikasikan bahwa data variabel Z cukup homogen selama periode observasi, dengan nilai antara 9,484633 hingga 11,43153; 5). Variabel Dependen (Y): Memiliki nilai rata-rata sebesar 27,57411 dengan standar deviasi sebesar 0,790961. ariabel dependen stabil di sekitar rata-rata dengan fluktuasi relatif rendah.

Uji Pemilihan Model Regresi

Uji Chow

Tabel 3. *Analisis Uji Chow*

Effects Test	*Statistic*	*d.f.*	*Prob.*
Cross-section F	25.145448	(26,77)	0.0000
Cross-section Chi-square	243.033402	26	0.0000

Pengujian awal menggunakan Uji Chow *(Redundant Fixed Effects Test)* untuk membandingkan model *Common Effect* (CEM) dan *Fixed Effect* (FEM). Hasil menunjukkan nilai *Cross-section Chi-square sebesar* 243,033402 dengan probabilitas 0,0000 (< 0,05), sehingga H_0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, FEM lebih tepat digunakan dibandingkan CEM. Selanjutnya, pengujian dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk menentukan pemilihan antara FEM dan *Random Effect* (REM).

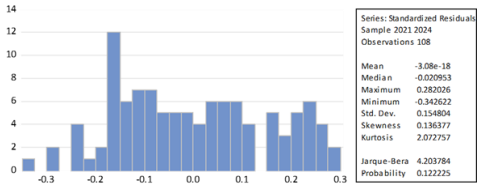
Uji Haustman

Tabel 4. *Analisis Uji Haustman*

Test Summary	*Chi-Sq. Statistic*	*Chi-Sq. d.f.*	*Prob.*
Cross-section random	22.309147	4	0.0002

Setelah Uji Chow menunjukkan bahwa FEM lebih baik daripada Common Effect, dilakukan Uji Hausman untuk membandingkan FEM dengan REM. Hasil menunjukkan nilai Chi-Square sebesar 22,309147 dengan probabilitas 0,0002 (< 0,05), sehingga H_0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, FEM merupakan model yang paling tepat dan efisien. Oleh karena itu, pengujian tidak dilanjutkan ke Uji Lagrange Multiplier, dan analisis dapat diteruskan ke uji asumsi klasik serta uji hipotesis menggunakan FEM.

Uji Asumsi Klasik



Gambar 1*. Analisis Uji Normal*

Berdasarkan hasil uji normalitas didapatkan Nilai *Prob. Jarque-Bera* sebesar 0,122225 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. *Analisis Uji Multikolinearitas*

	X1	X2	DX3	Z
X1	1.000000	-0.337796	-0.024262	0.361551
X2	-0.337796	1.000000	0.062313	-0.222003
DX3	-0.024262	0.062313	1.000000	-0.052471
Z	0.361551	-0.222003	-0.052471	1.000000

Hasil pengujian multikolinearitas didapatkan bahwa nilai korelasi antara X1 dan X2 sebesar -0,337796, X1 dan DX3 sebesar -0,24262, lalu nilai korelasi X2 dan DX3 sebesar 0,062313 dan nilai korelasi X1 dan Z (moderasi) yaitu sebesar 0,361551. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas yang serius antar variabel independen dalam model regresi ini, karena seluruh nilai korelasi antar variabel independen dalam penelitian berada di bawah 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen bersifat independen dan model layak untuk digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. *Analisis Uji Heteroskedastisitas*

Variable	*Coefficient*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*Prob.*
C	-5.216507	3.740744	-1.394511	0.1672
X1	0.262467	0.166102	1.580158	0.1182
X2	-0.016203	0.030821	-0.525719	0.6006
DX3	0.006413	0.005403	1.186959	0.2389
Z	0.413535	0.314674	1.314169	0.1927

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji Glejser adalah jika nilai signifikansi (Prob.) lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Dikarenakan seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari heteroskedastisitas. Dengan demikian, varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap (konstan) dan model layak digunakan untuk menguji hipotesis.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 7. *Analisis Regresi Data Panel dengan Fixed Effect Model*

Variable	*Coefficient*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*Prob.*
C	22.54680	1.409755	15.99342	0.0000
X1	1.342302	0.269469	4.981288	0.0000
X2	-0.199722	0.066378	-3.008868	0.0035
DX3	0.004690	0.011632	0.403182	0.6879
R-squared	0.946410	*Mean dependent var*		27.57411
Adjusted R-squared	0.926485	*S.D. dependent var*		0.790961
S.E. of regression	0.214458	*Akaike info criterion*		-0.011273
Sum squared resid	3.587391	*Schwarz criterion*		0.733763
Log likelihood	30.60877	*Hannan-Quinn criter.*		0.290812
F-statistic	47.49977	*Durbin-Watson stat*		1.541088
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel diatas diperoleh persamaan sebagai berikut:

Y = 22.5468024009 + 1.34230201871*X1 - 0.199722407041*X2 + 0.00468994664811*DX3 + [CX=F].

Berdasarkan persamaan diatas dapat diambil kesimpulan: 1). Nilai Konstanta (C) sebesar 22,54680 mengandung arti bahwa apabila seluruh variabel independen dalam penelitian ini (X1, X2, dan DX3) diasumsikan tetap atau bernilai nol, maka variabel dependen (Y) diprediksi akan memiliki nilai sebesar 22,54680 satuan; 2). Nilai Koefisien Regresi Variabel X1 sebesar 1,342302 menunjukkan adanya hubungan searah (positif) antara variabel X1 terhadap variabel Y. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel X1 sebesar satu satuan, maka diprediksi akan memicu kenaikan pada variabel Y sebesar 1,342302 satuan, dengan catatan variabel lainnya dianggap konstan; 3). Nilai Koefisien Regresi Variabel X2 sebesar -0,199722 menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah (negatif) terhadap

variabel Y. Ini berarti, setiap kenaikan satu satuan pada variabel X2 justru akan memberikan dampak penurunan pada variabel Y sebesar 0,199722 satuan. Arah negatif ini mengindikasikan bahwa peningkatan variabel X2 cenderung menghambat atau mengurangi nilai variabel dependen; 4). Nilai Koefisien Regresi Variabel DX3 sebesar 0,004690 menunjukkan pengaruh positif yang bersifat marjinal. Setiap kenaikan satu satuan pada variabel DX3 diperkirakan akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 0,004690 satuan. Meskipun searah, kontribusi variabel ini tergolong sangat kecil dibandingkan variabel lainnya dalam model.

Analisis Regresi Moderasi

Tabel 8. *Analisis Regresi Moderasi dengan Fixed Effect*

Variable	*Coefficient*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*Prob.*
C	116.5475	21.41343	5.442730	0.0000
X1	-11.21373	4.105314	-2.731517	0.0079
X2	-1.265390	1.196408	-1.057658	0.2937
DX3	0.021723	0.018577	1.169325	0.2460
Z	-8.852561	2.098061	-4.219400	0.0001
X1Z	1.133208	0.407610	2.780128	0.0069
X2Z	0.116478	0.116988	0.995648	0.3227
X3Z	0.000851	0.002874	0.296152	0.7679
Effects Specification				
R-squared	0.963285	*Mean dependent var*		27.57411
Adjusted R-squared	0.946913	*S.D. dependent var*		0.790961
S.E. of regression	0.182243	*Akaike info criterion*		-0.315389
Sum squared resid	2.457724	*Schwarz criterion*		0.528986
Log likelihood	51.03100	*Hannan-Quinn criter.*		0.026974
F-statistic	58.83477	*Durbin-Watson stat*		1.764470
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel diatas diperoleh persamaan sebagai berikut:

Y = 116.547499294 - 11.2137330394*X1 - 1.26539022276*X2 + 0.0217225946402*DX3 - 8.8525608686*Z + 1.13320810022*X1Z + 0.116478321412*X2Z + 0.000851264520882*X3Z + [CX=F].

Berdasarkan persamaan diatas dapat diambil kesimpulan: 1). Nilai Konstanta (C) sebesar 116,5475 mengandung arti bahwa apabila seluruh variabel independen (X1, X2, DX3), variabel moderasi (Z), dan variabel interaksi diasumsikan tetap atau bernilai nol, maka variabel dependen (Y) diprediksi akan memiliki nilai sebesar 116,5475 satuan; 2). Nilai Koefisien Interaksi X1Z sebesar 1,133208 menunjukkan adanya hubungan searah (positif) yang dihasilkan dari interaksi antara X1 dan Z terhadap Y. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan variabel Z mampu memperkuat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y. Dengan kata lain, setiap peningkatan interaksi antara X1 dan Z sebesar satu satuan diprediksi akan memicu kenaikan pada variabel Y sebesar 1,133208 satuan; 3).

Nilai Koefisien Interaksi X2Z sebesar 0,116478 menunjukkan pengaruh positif dari interaksi variabel X2 dan Z terhadap variabel Y. Ini berarti bahwa secara matematis, sinergi antara X2 dan Z memberikan dampak peningkatan pada variabel Y sebesar 0,116478 satuan. Namun, kontribusi ini relatif kecil dibandingkan interaksi pada variabel lainnya; 4). Nilai Koefisien Interaksi X3Z sebesar 0,000851 menunjukkan pengaruh positif yang bersifat marjinal. Setiap kenaikan satu satuan pada interaksi antara DX3 dan Z diperkirakan hanya akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 0,000851 satuan. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Z memberikan kontribusi yang sangat rendah dalam memoderasi hubungan DX3 terhadap variabel dependen dalam model ini.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan pada model REM yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Variabel X1 memiliki nilai t-statistic sebesar 4,981288 dengan nilai prob. (signifikasi) sebesar 0,0000 (< 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y; 2). Variabel X2 memiliki nilai t-statistic sebesar -3,008868 dengan nilai prob. (signifikasi) sebesar 0,0035 (<0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel Y; 3). Variabel X3 memiliki nilai t-statistic sebesar 0,403187 dengan nilai prob. (signifikasi) sebesar 0,6879 (>0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y; 4).

Variabel X1Z (interaksi) memiliki nilai *t-statistic* sebesar 2,780128 dengan nilai prob. (signifikasi) sebesar 0,0069 (<0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1Z (interaksi) dapat memoderasi hubungan antara variabel X1 dan Y. anda koefisien yang positif menunjukkan bahwa keberadaan variabel Z mampu memperkuat pengaruh variabel X1 terhadap variabel dependen; 5). Variabel X2Z (interaksi) memiliki nilai t-statistic sebesar 0,995648 dengan nilai prob. (signifikasi) sebesar 0,3227 (>0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2Z (interaksi) tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel X2 dan Y; 6). Variabel X3Z (interaksi) memiliki nilai t-statistic sebesar 0,296152 dengan nilai prob. (signifikasi) sebesar 0,7679 (>0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2Z (interaksi) tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel X2 dan Y.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil analisis pada regresi data panel, didapatkan bahwa variabel independen (X) memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Y). Sebagaimana hasil pada olah data, diperoleh nilai F-statistic sebesar 47,49977 dengan nilai signifikansi Prob *(F-statistic)* sebesar 0,000000 (<0,05).

Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan oleh angka Adjusted R-squared sebesar 0,926485 atau 92,65%, yang mengindikasikan bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan secara sangat kuat oleh variabel independen dalam model (X1, X2, dan DX3). Hal ini berarti kontribusi seluruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat adalah sebesar 92,65%, sementara sisanya yaitu sebesar 7,35% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian atau variabel yang tidak dimasukkan dalam estimasi ini.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Kantor Bank terhadap realisasi penyaluran KUR

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa jumlah kantor bank (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 1,342302 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kantor bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penyaluran KUR pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2021-2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas jaringan kantor bank di suatu daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit, khususnya dalam program KUR. Hasil ini selaras dengan teori intermediasi keuangan, yang menjelaskan bahwa bank berperan sebagai perantara yang mengumpulkan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali sebagai kredit. Dalam konteks ini, keberadaan kantor

bank secara fisik menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan aksesibilitas keuangan. Semakin banyak jumlah kantor bank, maka semakin mudah masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk mengakses layanan perbankan termasuk pengajuan KUR.

Pengaruh Peran Pemerintah Daerah terhadap realisasi penyaluran KUR

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan, didapatkan bahwa variabel peran pemerintah daerah (X2) dalam memfasilitasi akses pembiayaan dengan mengidentifikasi, mensurvei, dan mengunggah data debitur potensial ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), yang menggambarkan aktivitas kelembagaan untuk mendukung pembiayaan lokal serta sebagai bagian dari upaya percepatan penyaluran KUR, terutama dalam mendukung pembentukan basis data calon debitur potensial yang akurat dan terintegrasi dengan menggunakan indikator jumlah data debitur potensial memiliki nilai koefisien sebesar -0,199722 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0035 (<0,05).

Hal ini menunjukkan bahwa variabel peran pemerintah daerah tersebut berpengaruh signifikan terhadap realisasi penyaluran KUR namun dengan arah hubungan yang negatif. Secara interpretatif, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih kurang berperan dalam implementasi KUR khususnya dalam pembentukan basis data debitur potensial di daerahnya yang kemudian diunggah dalam laman aplikasi SIKP. Temuan empiris yang diperoleh dari laporan monitoring dan evaluasi KUR oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan peran pemerintah daerah. Fenomena ini secara teoritis dapat dijelaskan secara komprehensif menggunakan model implementasi kebijakan dari Donald S.Van Meter dan Carl E.Van Horn yang menekankan hal-hal yang menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Aspek sumber daya *(resources*), permasalahan seperti seringnya pergantian pegawai tanpa adanya transfer knowledge serta keterbatasan kapasitas operator dalam mengelola data menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data UMKM yang tersebar di berbagai dinas teknis juga menjadi hambatan struktural dalam proses pengumpulan dan validasi data. Selanjutnya, dari aspek komunikasi dan koordinasi antar organisasi (*inter-organizational communication*), kendala seperti data debitur yang tidak valid, sulit dihubungi, serta tidak adanya kejelasan tindak lanjut dari pihak bank menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan perbankan belum berjalan optimal. Hal ini mengakibatkan proses penyaluran kredit menjadi lambat dan tidak efisien.

Aspek kondisi sosial, ekonomi, dan politik (*economic, social, and political environment*), rendahnya kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem SIKP serta keterbatasan literasi keuangan juga memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Ketika pelaku usaha tidak merasakan manfaat langsung, maka partisipasi mereka dalam sistem akan menurun, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas data yang dihimpun. Dengan demikian, temuan ini memperkuat hasil penelitian bahwa hubungan negatif antara peran pemerintah daerah dan penyaluran KUR disebabkan oleh adanya implementation gap, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Pengaruh tingkat NPL terhadap realisasi penyaluran KUR

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan, didapatkan bahwa variabel NPL (X3) memiliki nilai koefisien sebesar 0,004690 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,6879 (>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPL tidak berpengaruh terhadap realisasi penyaluran KUR pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2021-2024. Artinya, tinggi

rendahnya tingkat kredit bermasalah pada perbankan tidak menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan bank dalam menyalurkan KUR selama periode penelitian. Salah satu determinasi utama yang menjelaskan fenomena ini adalah adanya mekanisme penjaminan kredit (*risk sharing*), di mana risiko pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung oleh perbankan, melainkan dialihkan sebagian kepada lembaga penjamin seperti Askrindo dan Jamkrindo.

Eksposur risiko yang dihadapi bank menjadi lebih rendah dibandingkan dengan kredit komersial pada umumnya. Fenomena ini juga dapat dijelaskan oleh karakteristik kebijakan KUR pada periode penelitian, yaitu tahun 2021-2024, di mana penyaluran KUR cenderung bersifat policy-driven (digerakan oleh kebijakan pemerintah) dibandingkan *market-driven* (digerakan oleh mekanisme pasar). Pada periode tersebut, pemerintah secara aktif mendorong penyaluran KUR sebagai salah satu dari strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca COVID-19.

Tidak signifikannya pengaruh NPL juga dipengaruhi oleh kondisi struktural UMKM. Meskipun program KUR telah diperluas, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengakses pembiayaan formal akibat keterbatasan literasi keuangan, kurangnya informasi, serta belum terpenuhinya persyaratan administratif dan kelayakan usaha. Selain itu, pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM di beberapa daerah masih belum optimal, sehingga tidak semua pelaku usaha siap untuk menerima pembiayaan dari perbankan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran KUR tidak hanya ditentukan oleh faktor risiko kredit, tetapi juga oleh tingkat kesiapan dan aksesibilitas pelaku usaha.

Keterbatasan tersebut berdampak pada perbankan cenderung menyalurkan kredit kepada segmen debitur yang relatif lebih siap, sehingga fluktuasi NPL tidak secara langsung memengaruhi volume penyaluran KUR secara keseluruhan. Hal ini juga selaras dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel NPL KUR dan LDR berpengaruh terhadap penyaluran KUR, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, fenomena ini terjadi karena kebijakan kuantitatif pemerintah cenderung mereduksi sensitivitas perbankan terhadap risiko NPL demi mengejar target penyaluran, sehingga perbankan tetap berkewajiban menyalurkan KUR di tengah dinamika kualitas kredit (Siregar & Parabowo, 2022).

Pengaruh PDRB dalam memoderasi hubungan jumlah kantor bank terhadap KUR

Berdasarkan hasil uji MRA, diperoleh bahwa interaksi antara jumlah kantor bank dan PDRB (X1Z) memiliki nilai koefisien sebesar 1,133208 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0069, lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB mampu memoderasi secara signifikan pengaruh jumlah kantor bank terhadap realisasi penyaluran KUR. Koefisien interaksi yang bernilai positif menunjukkan bahwa PDRB berperan sebagai moderator yang memperkuat (*strengthening moderation*). Artinya, semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, maka pengaruh jumlah kantor bank terhadap penyaluran KUR akan semakin kuat. Secara konseptual, PDRB mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi suatu wilayah.

Daerah dengan PDRB tinggi memiliki jumlah pelaku usaha yang lebih banyak, daya beli yang lebih tinggi, serta kebutuhan pembiayaan yang lebih besar. Dalam kondisi tersebut, keberadaan kantor bank menjadi lebih efektif karena mampu menjangkau permintaan kredit yang tinggi dari masyarakat. Sebaliknya, pada daerah dengan PDRB rendah, meskipun jumlah kantor tersedia, efektifitasnya dalam meningkatkan penyaluran KUR menjadi terbatas karena rendahnya aktivitas ekonomi.

Berdasarkan teori intermediasi keuangan, bank berfungsi optimal jika terdapat unit surplus dan unit defisit yang aktif. PDRB yang tinggi mengidentifikasikan ekosistem bisnis yang sudah

terbentuk. Ketika bank menambah jaringan kantornya di wilayah dengan PDRB tinggi, proses intermediasi berjalan lebih cepat karena calon debitur memiliki prospek usaha yang lebih jelas dan layak (*feasible*). Hal ini menyebabkan penambahan kantor bank di wilayah maju memberikan dampak peningkatan penyaluran KUR yang lebih besar dibandingkan di wilayah dengan PDRB rendah. Hal ini juga diperkuat dengan teori pertumbuhan endogen, dimana salah satu inti dari teori tersebut adalah mengenai spillover effects atau dampak rembesan. Wilayah dengan PDRB tinggi memiliki pendukung infrastruktur dan keterkaitan antar usaha yang lebih baik. Dalam kondisi ini, setiap kredit yang disalurkan melalui kantor bank akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas (efek multiplikasi).

Pengaruh PDRB dalam memoderasi hubungan Peran Pemerintah Daerah terhadap KUR

Berdasarkan hasil uji MRA, diperoleh bahwa interaksi antara peran pemerintah daerah dan PDRB (X2Z) memiliki nilai koefisien sebesar 0,116478 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,3227 (>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa PDRB tidak mampu memoderasi pengaruh peran pemerintah daerah terhadap realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Dengan tidak signifikannya variabel interaksi tersebut, dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya PDRB suatu daerah tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara peran pemerintah daerah dengan penyaluran KUR. Secara analitis, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas peran pemerintah daerah lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti kualitas data debitur dan koordinasi pemda dengan pihak perbankan, dibandingkan dengan kondisi ekonomi daerah. Baik pada daerah dengan PDRB tinggi maupun rendah, peran pemerintah daerah tetap menghadapi tantangan yang relatif sama dalam implementasinya.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn membantu menjelaskan mengapa PDRB tidak memoderasi hubungan ini. Menurut model tersebut, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk standar kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial-ekonomi dan politik. Dalam konteks KUR, meskipun PDRB mencerminkan kapasitas ekonomi daerah, variabel ini tidak secara langsung memengaruhi faktor-faktor kunci implementasi, seperti kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan basis data calon debitur potensial yang akurat dan terintegrasi yang kemudian diunggah pada laman aplikasi SIKP ataupun tingkat koordinasi dengan bank penyalur. Dengan kata lain, efektivitas peran pemerintah daerah dalam konteks KUR lebih ditentukan oleh kompetensi operasional, koordinasi lintas lembaga, dan kualitas data debitur, dibandingkan dengan besarnya PDRB suatu daerah. Hal ini menegaskan bahwa PDRB bukan faktor pembatas atau penguat utama dalam hubungan antara peran pemerintah daerah dan penyaluran KUR, melainkan faktor eksternal yang lebih bersifat konteks ekonomi makro.

Pengaruh PDRB dalam memoderasi hubungan tingkat NPL terhadap KUR

Berdasarkan hasil uji MRA, diperoleh bahwa interaksi antara tingkat NPL dan PDRB (X3Z) memiliki nilai koefisien sebesar 0,000851 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,7679 (>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa PDRB tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat NPL terhadap realisasi penyaluran KUR. Hasil ini juga menunjukkan bahwa tingkat aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dari PDRB tidak memengaruhi hubungan antara NPL dan penyaluran KUR. Dalam perspektif Teori Intervensi Negara, penyaluran kredit tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Periode 2021-2024, program KUR di Indonesia merupakan bagian dari strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di mana pemerintah secara aktif mengintervensi sektor keuangan melalui berbagai instrumen kebijakan, seperti subsidi bunga, penetapan target penyaluran kredit, serta penguatan skema penjaminan. Dalam kondisi ini, perbankan tidak lagi bertindak semata-mata sebagai lembaga intermediasi yang mempertimbangkan risiko dan profitabilitas, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan pemerintah (policy agent). Akibatnya, variabel risiko seperti NPL kehilangan perannya sebagai determinan utama dalam penyaluran kredit.

Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui Teori Netralisasi Risiko (*Risk Neutralization Theory*). Teori ini menyatakan bahwa ketika risiko dalam suatu aktivitas ekonomi telah diminimalkan atau dialihkan melalui mekanisme tertentu, maka pengaruh risiko tersebut terhadap keputusan ekonomi menjadi tidak signifikan. Dalam program KUR, risiko kredit tidak sepenuhnya ditanggung oleh perbankan, melainkan dibagi dengan lembaga penjamin seperti Askrindo dan Jamkrindo. Selain itu, adanya subsidi bunga juga mengurangi tekanan finansial terhadap debitur, sehingga menurunkan potensi gagal bayar. Dengan adanya mekanisme penjaminan dan subsidi tersebut, risiko kredit yang tercermin dalam NPL menjadi "ternetralisasi". Artinya, meskipun tingkat NPL meningkat, hal tersebut tidak secara langsung memengaruhi keputusan bank dalam menyalurkan KUR. Dalam kondisi ini, variabel ekonomi makro daerah seperti PDRB juga tidak memiliki kekuatan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut, karena faktor risiko tersebut sudah tidak lagi dominan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dan MRA mengenai pengaruh jumlah kantor bank, peran pemerintah daerah, dan tingkat NPL terhadap realisasi penyaluran KUR dengan PDRB, diperoleh kesimpulan bahwa jumlah kantor bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penyaluran KUR dengan nilai koefisien sebesar 1,342302 dan probabilitas 0,0000 (<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin luas jaringan kantor bank, maka semakin tinggi aksesibilitas layanan keuangan bagi UMKM, sehingga mendorong peningkatan penyaluran KUR. Peran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran KUR dengan koefisien sebesar -0,199722 dan probabilitas 0,0035 (<0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya dalam pendataan dan pengunggahan calon debitur melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), masih belum optimal sehingga berdampak pada kurang tepatnya penyaluran KUR. Sementara itu, tingkat NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran KUR dengan nilai probabilitas sebesar 0,6879 (>0,05). Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa PDRB mampu memperkuat pengaruh jumlah kantor bank terhadap penyaluran KUR, dengan koefisien interaksi sebesar 1,133208 dan probabilitas 0,0069 (<0,05). Namun demikian, PDRB tidak memoderasi pengaruh peran pemerintah daerah (p-value 0,3227 >0,05) maupun NPL (p-value 0,7679 >0,05) terhadap penyaluran KUR. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa variabel yang paling dominan dalam memengaruhi penyaluran KUR adalah faktor aksesibilitas perbankan dan intervensi kebijakan pemerintah, sementara faktor risiko kredit dan kondisi ekonomi daerah memiliki pengaruh yang lebih terbatas dalam konteks program KUR.

Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya peran bank, pemerintah daerah, NPL, dan PDRB dalam penyaluran KUR, dengan keterbatasan pada variabel, data sekunder, dan periode singkat. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain, memperpanjang periode, serta menggunakan pendekatan kualitatif atau *mixed methods* untuk hasil lebih komprehensif dan mendalam.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

Aristanto, E. (2019). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 7(1). https://doi.org/10.26905/jmdk.v7i1.2841

Arnola, A., Ramadhan, S., Pratama, Y., Efendi, M. R., & Fadilah, M. (2025). Peran Perbankan Dalam Mendukung Permodalan UMKM Melalui Program Kredit Usaha Rakyat. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 3(1), 34-40. https://doi.org/10.70248/jakpt.v3i1.2570

Asmarani, P. N., & Solehudin, S. (2024). Literatur review penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 856–867. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i5.3635

Bosawer, A. L., Tinaprila, N., & Feryanto, F. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor agribisnis Bank Papua. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 8(1), 257–267. https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2024.008.01.21

Faiza, J. A., & Dewi, S. (2025). Peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan pendapatan nasabah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3). https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.32677

Farida. (2024). Program Kredit Usaha Rakyat di Indonesia: Kajian dan implikasi kebijakan. *IKRAITH-Ekonomika*, 8(3). https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v8i3.5431

Firmansyah, A., & Pratiwi, N. (2022). Analisis pengaruh jaringan kantor bank terhadap penyaluran kredit. *Jurnal Manajemen Perbankan*, 5(2), 120–132. https://doi.org/10.21067/jmp.v5i2.6789

Hidayat, T., & Lestari, D. (2021). Pengaruh NPL dan CAR terhadap penyaluran kredit perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 15(2), 89–101. https://doi.org/10.15408/jie.v15i2.20215

Kurniawan, E., & Sari, L. (2023). Moderating effect of regional GDP on bank lending behavior. *Journal of Economic Studies*, 18(4), 210–225. https://doi.org/10.1108/JES-04-2023-0123

Nugroho, Y., & Santoso, B. (2022). Determinan penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(3), 233–245. https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i3.7890

Pramudyawardani, N. I., & Hakim, A. (2024). Faktor penentu penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 181–187. https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art9

Prasetyo, H., & Wibowo, A. (2021). Analisis penyaluran kredit usaha kecil dan menengah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 36(1), 55–70. https://doi.org/10.22146/jieb.59876

Putri, M. A., & Rahman, A. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap penyaluran kredit perbankan. *Jurnal Ekonomi Regiona*l, 13(1), 45–56. https://doi.org/10.26905/jurek.v13i1.5678

Ramadan, S. (2023). Tinjauan yuridis mitigasi Non Performing Loan pada Kredit Usaha Rakyat. *Jurnal Hukum Respublica*, 23(2). https://doi.org/10.31849/respublica.v23i02.18024

Saputra, R., & Dewi, K. (2023). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM dan akses pembiayaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 77–90. https://doi.org/10.21776/jap.v10i1.14567

Sari, N., & Utami, P. (2022). Pengaruh faktor makroekonomi terhadap kredit perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Makro*, 14(2), 134–148. https://doi.org/10.20885/jem.v14i2.13579

Simangunsong, S. Y., & Nurhadi. (2023). Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan inflasi terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 4(1), 37–48. https://doi.org/10.31258/current.4.1.37-48

Siregar, H., & Prabowo, T. (2022). Government intervention and credit risk in microfinance: Evidence from Kredit Usaha Rakyat (KUR) in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues,* 12(3), 145–152. https://doi.org/10.32479/ijefi.12987s

Solekah, R., & Nuvriasarai, A. (2025). Pengaruh Kualitas Produk, Customer Relationship Management, dan Inovasi Pemasaran terhadap Keunggulan Bersaing UMKM Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal Social Society*, *5*(2), 1087–1100. https://doi.org/10.54065/jss.5.2.2025.854

Susanti, S., Sujana, S., & Zuhdi, S. (2023). Tinjauan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada nasabah. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 6(1). https://doi.org/10.37641/jadkes.v6i1.3145

Wulandari, D., & Sari, R. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran kredit UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 101–112. https://doi.org/10.29259/jep.v20i2.15234

Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147

Widiyaningrum, R. D. W., & Nuvriasari , A. (2025). Peran Digital Marketing, Kapabilitas Pemasaran, dan Inovasi Hijau terhadap Kinerja Pemasaran UMKM Batik Pewarna Alami di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal Social Society*, *5*(2), 1204–1217. https://doi.org/10.54065/jss.5.2.2025.862